



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan, maka diwajibkan pada daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2019-2023 di tingkat Provinsi yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2015-2019;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2023, maka disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
2. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
5. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

BAB II
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Pasal 2

RAD-PG merupakan pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dalam bentuk arah dan kebijakan, strategi dan program serta kegiatan dengan penetapan target pencapaian.

Pasal 3

Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk menjadi acuan dalam rangka pembangunan pangan di Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

RAD-PG menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyusun kegiatan sekaligus menjadi instrumen sinergi berbagai lembaga di daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan dan gizi.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Dalam rangka penyesuaian dengan RAD-PG Tahun 2015-2019, dilakukan pemantauan dan evaluasi RAD-PG Tahun 2019-2023.

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Tim RAD-PG yang memiliki kewenangan melakukan pelaporan pemantauan dan evaluasi serta bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- (2) Susunan Tim RAD-PG sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Tim RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ketuai seorang koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal serta secara horizontal dan vertikal kepada perangkat daerah atau kementerian terkait dalam RAD-PG.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat adanya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan untuk jangka 5 (lima) tahun ditetapkan untuk jangka waktu tahun 2019-2023.

Pasal 10

RAD-PG dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan:

- a. hasil pemantauan dan evaluasi RAD-PG;
- b. perubahan KSPG; dan/atau
- c. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada 23 September 2019

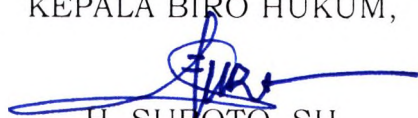
Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 57.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 56
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN
GIZI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023

DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023

1.1 Latar Belakang

Pangan dan Gizi memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Hubungan ketahanan pangan dan gizi dengan pembangunan suatu daerah bersifat timbal balik, yang berarti pangan dan gizi akan menentukan keberhasilan suatu bangsa, begitu pula sebaliknya kondisi suatu bangsa dapat mempengaruhi status gizi masyarakatnya. Pangan dan Gizi dalam kaitannya dengan pembangunan suatu daerah berkaitan dengan sumber daya manusia, karena gizi sebagai sentra untuk pembangunan manusia.

Permasalahan pangan dan gizi di Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Timur masih ditemukan masalah kekurangan gizi, terutama pada Remaja Putri, Wanita Usia Subur, Ibu Hamil, Bayi dan Balita. Selain itu masih kurangnya peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, kurangnya peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, kurangnya peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kurangnya penguatan kelembagaan pangan dan gizi.

Salah satu faktor yang berperan penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing adalah melalui pembangunan pangan dan gizi terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia dua tahun yang merupakan kesempatan emas untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Pembangunan pangan dan gizi memiliki dimensi yang luas mulai dari aspek produksi pangan, distribusi, konsumsi yang dapat mempengaruhi status gizi. Selain aspek pangan, status gizi juga dipengaruhi oleh faktor pola asuh dan kesehatan lingkungan, serta kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karenanya, masalah gizi juga terkait dengan pendidikan, budaya, agama, infrastruktur, air bersih, higiene-sanitasi, teknologi dan industri, kemiskinan, komunikasi dan informasi, pembangunan desa, pengawasan obat dan makanan, keluarga berencana, dan perlindungan anak.

Untuk mencapai status perbaikan gizi dan pangan nasional peran pemerintah saja tidak cukup, karena proses pengawasan dan pendanaan yang setingkat nasional tidaklah mudah. Disinilah peran daerah

diperlukan untuk dapat melaksanakan maupun menginovasikan program gizi dan pangan. Pemerintah daerah yang dianggap lebih memahami permasalahan daerahnya dituntut akan inovasinya serta jalinan hubungan kemitraan dengan swasta. Oleh karena itu permasalahan perbaikan gizi masyarakat merupakan upaya dari berbagai sektor yang membutuhkan sinergi dan harus terkoordinasi. Oleh karena itu seluruh sektor yang berkaitan dengan perbaikan pangan dan gizi perlu berkoordinasi sehingga tercapai status gizi yang optimal. Untuk melakukan koordinasi di bidang pangan dan gizi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi. Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta tata cara pelaporan rencana aksi pangan dan gizi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. Di tingkat daerah disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) mengacu kepada Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Untuk memudahkan pengorganisasian dari sektor-sektor yang berkontribusi kepada Rencana Aksi Pangan dan Gizi maka diperlukan pengelompokan dalam bentuk pilar yaitu:

- 1) Perbaikan Gizi Masyarakat;
- 2) Peningkatan Aksesibilitas Pangan Yang Beragam;
- 3) Mutu dan Keamanan Pangan;
- 4) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- 5) Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi.

Dalam rangka pensinergian kebijakan pengentasan masalah Pangan dan Gizi di Kalimantan Timur maka proses penyusunan dokumen RAD-PG Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 melibatkan berbagai Perangkat Daerah, instansi vertikal serta akademisi yaitu:

- 1) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan;

- 4) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 6) Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 7) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8) Dinas Sosial;
- 9) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 10) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 11) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- 12) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Kalimantan Timur;
- 13) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur; dan
- 14) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

1.2 Tujuan RAD-PG

RAD-PG bertujuan untuk :

1. Mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi nasional melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor;
2. Meningkatkan pemahaman, peran dan komitmen pemangku kepentingan pangan dan gizi untuk mencapai kedaulatan pangan serta ketahanan pangan dan gizi;
3. Memberikan panduan dan masukan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan pangan dan gizi dengan menggunakan pendekatan multisektor;
4. Sebagai instrumen utama pelaksanaan aksi intervensi penurunan stunting terintegrasi;
5. Memberikan panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan pangan dan gizi multisektor.

1.3 Dasar Hukum RAD-PG

1.3 Dasar Hukum RAD-PG

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi; dan
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

2.1 Tujuan dan Sasaran

Penanganan masalah pangan gizi memerlukan rencana yang melibatkan multi sektor, perbaikan gizi tidak dapat dicapai hanya melalui sektor kesehatan saja mengingat sektor kesehatan hanya berperan dalam penyembuhan/penanganan berbagai masalah gizi. Pencegahan terjadinya masalah gizi memerlukan kontribusi dari berbagai sektor, masalah gizi merupakan upaya lintas sektor untuk mengantisipasi penyebab langsung, tidak langsung, dan akar masalah.

Tujuan utama yang ingin diwujudkan dengan adanya perbaikan pangan dan gizi melalui pendekatan multi sektor adalah terbentuknya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian konsep ketahanan pangan dan gizi yang luas bertolak pada tujuan akhir dari ketahanan pangan yaitu tingkat kesejahteraan manusia. Hal ini sesuai dengan sasaran kedua *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Pada tujuan kedua SDGs tersebut adalah diharapkan pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk malnutrisi termasuk mencapai target 2025 untuk penurunan *stunting* dan *wasting* pada balita dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil dan menyusui, dan lansia.

Sasaran yang ingin dicapai dari upaya perbaikan pangan dan gizi sebagaimana target yang ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023 khususnya dalam bidang pangan dan gizi tercantum pada Tabel 2.1, Tabel 2.2 dan Tabel 5.

Tabel 2.1
Indikator dan Sasaran Pangan

No	Indikator	Status Awal (2018)	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
1.	Skor Pola Pangan Harapan	84,6	84,7	86,9	89,1	91,2	93,4
2.	Angka Kecukupan Energi (KKal/Hari)	1.999	2.024	2.049	2.075	2.100	2.125
3.	Angka Kecukupan Protein (KKal/Hari)	62,00	67,90	67,00	67,10	67,20	67,30
4.	Produksi padi (gabah kering giling) (juta ton);	383.958	403.000	423.000	444.000	466.000	495.000
5.	Produksi jagung (juta ton);	80.000	90.000	100.000	105.000	110.000	120.000
6.	Produksi daging (juta ton);	8,31	8,61	8,93	9,25	9,59	9,95
7.	Konsumsi ikan (kg/perkapita/tahun);	45	50	52	54	56	58
8.	Konsumsi Daging (kg/perkapita/tahun)	17,5	17,7	17,9	18,1	18,2	18,5
9.	Konsumsi sayur dan buah(gr/perkapita/tahun)	210	287	364	441	518	671

Tabel 2.2
Indikator dan Sasaran Percepatan Perbaikan Gizi

No	Indikator	Status Awal (2018)	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
10.	Prevalensi kurus (wasting) pada anak balita (persen)	7,5	7,2	6,9	6,6	6,3	6
11.	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) (persen)	29,4	29,1	28,8	28,6	28,3	28
12.	Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia >18 tahun (persen)	28,7	27,7	25,7	23,7	21,7	19,7

2.2 Prinsip dan Pendekatan Kunci

Dalam Pelaksanaan RAD-PG Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, perlu memperhatikan 5 Pilar yang ada. Adapun pilar dan strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Pilar Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

Pilar 1– Perbaikan gizi masyarakat, meliputi bidang:

- a. Promosi dan pendidikan gizi masyarakat;
- b. Pemberian suplementasi gizi;
- c. Pelayanan kesehatan dan masalah gizi;
- d. Pemberdayaan masyarakat dibidang pangan dan gizi;
- e. Jaminan social yang mendukung perbaikan pangan dan gizi;dan
- f. Pendidikan anak usia dini.

Pilar 2 – Peningkatan akses bilitas pangan yang beragam, meliputi bidang:

- a. Produksi pangan dalam negeri;
- b. Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal;
- c. Distribusi pangan;
- d. Konsumsi kalori, karbohidrat, protein, vitamin;dan
- e. Peningkatan akses pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.

Pilar 3 – Mutu dan Keamanan Pangan, meliputi bidang:

- a. Pengawasan regulasi dan standar gizi;
- b. Pengawasan keamanan pangan segar;
- c. Pengawasan keamanan pangan olahan;
- d. Pengawasan pangan sarana air minum dan tempat-tempat umum;dan
- e. Promosi keamanan pangan.

Pilar 4 – Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, meliputi bidang:

- a. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- b. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- c. Penyediaan air bersih dan sanitasi;

- d. Penerapan kawasan tanpa rokok; dan
- e. Penerapan perilaku sehat.

Pilar 5 – Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi, meliputi bidang:

- a. Perencanaan pangan dan gizi;
- b. Penguatan peranan lintas sektor;
- c. Penguatan pencatatan sipil dalam perbaikan gizi;
- d. Pelibatan pemangku kepentingan;
- e. Pemantauan dan evaluasi; dan
- f. Penyusunan dan penyampaian laporan.

Program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan berdasarkan bidang yang ada pada Pilar Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi beserta frekuensi pemantauan dan evaluasinya sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

2.3 Pendekatan Multi stakeholder

Di Indonesia secara umum dan Provinsi Kalimantan Timur secara khusus, persoalan gizi masih menjadi masalah utama khususnya pada gizi kurang dan *stunting*. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Melalui intervensi gizi spesifik yang dilakukan oleh sector kesehatan hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 30 persen dalam *stunting* pada anak balita. Sedangkan kontribusi 70 persen lainnya diperoleh dari kegiatan intervensi sensitif yang umumnya dilakukan oleh sektor non kesehatan. Intervensi gizi sensitive tersebut antara lain perlindungan sosial, penguatan pertanian, serta perbaikan air dan sanitasi lingkungan, dan keluarga berencana. Oleh sebab itu, pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitive secara bersamaan dan terintegrasi akan meningkatkan efektifitas penurunan masalah gizi. Selain integrasi, diperlukan dukungan faktor pemungkin yang akan memberikan kesempatan dan dorongan seluruh kegiatan berjalan dengan baik. Faktor pemungkin tersebut antara lain pengetahuan, pemerintahan dan kepemimpinan yang efektif, kapasitas dan sumber pendanaan.



Gambar 2.1. Kerangka Pendekatan Multi sektor Perbaikan Kualitas Sumber Daya Manusia

2.4 Penguatan RAD-PG

RAD-PG merupakan pedoman yang disusun dan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Daerah (Provinsi) yang selanjutnya diterjemahkan dalam RAD-PG kabupaten, dan kota. Penguatan RAD-PG merupakan hal yang perlu dilakukan, dengan langkah-langkah sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

Level Pelaksanaan	Kegiatan
Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat legal aspek RAD-PG <ol style="list-style-type: none"> a. Membentuk tim koordinasi di tingkat provinsi yang terdiri dari lintas sektor dan penetapan surat keputusan (SK) tim tersebut. Tim koordinasi terdiri dari tim pengarah dan tim teknis ; b. Menetapkan RAD-PG melalui Peraturan Gubernur 2. Perencanaan dan Penganggaran <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan RAD-PG di tingkat provinsi; b. Sosialisasi RAD-PG kepada pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; c. Program intervensi gizi sensitif dan spesifik dimasukkan dalam dokumen perencanaan dan intervensi tersebut memperoleh pendanaan yang memadai setiap tahunnya 3. Implementasi <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan intervensi gizi sensitif dan spesifik dengan memperhatikan pendekatan multi sektor dan pendekatan lain yang tepat; b. Intervensi gizi terintegrasi dalam rangka penurunan prevalensi stunting di lokasi prioritas 4. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pencatatan atau pengumpulan data terkait target indikator antara dan indikator utama yang harus dicapai, dapat berupa data rutin maupun survei; b. Melaksanakan pertemuan atau forum dalam rangka koordinasi dan evaluasi rutin lintas sektor; c. Kunjungan lapangan/pendampingan;

Level Pelaksanaan	Kegiatan
	d. Membuat laporan tahunan pelaksanaan RAD-PG di provinsi dan pelaksanaan RAD-PG kabupaten/kota.
Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat legal aspek RAD-PG <ol style="list-style-type: none"> a. Membentuk tim koordinasi di tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari lintas sektor dan penetapan surat keputusan (SK) tim tersebut. Tim koordinasi terdiri dari tim pengarah dan tim teknis; b. Menetapkan dasar hukum RAD-PG melalui Peraturan Bupati/ Walikota 2. Perencanaan dan Penganggaran <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi RAD-PG kepada pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota; b. Program intervensi gizi sensitif dan spesifik terdapat dalam dokumen perencanaan dan memastikan intervensi tersebut memperoleh pendanaan yang memadai setiap tahunnya. 3. Implementasi Melaksanakan intervensi gizi sensitif dan spesifik dengan memperhatikan pendekatan multi sektor dan pendekatan lain yang tepat. 4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pencatatan atau pengumpulan data terkait target indikator antara dan indikator utama yang harus dicapai, dapat berupa data rutin maupun survei; b. Melaksanakan pertemuan atau forum dalam rangka koordinasi dan evaluasi rutin lintas sektor; c. Kunjungan lapangan; d. Membuat laporan tahunan pelaksanaan RAD-PG di kabupaten/kota.

3.1 Faktor Determinan Pangan dan Gizi

Mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas, sehat, produktif dan memiliki daya saing tinggi merupakan factor determinan pangan dan gizi. Untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi diperlukan koordinasi dan kerjasama di antara pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non-pemerintah. Salah satu acuan yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan koordinasi dan kerjasama adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

Untuk meningkatkan ketahanan pangan diperlukan upaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat, apabila salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak berfungsi, maka pemerintah perlu melakukan tindakan intervensi. Upaya yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan dapat berupa bantuan/ subsidi saprodi, kebijakan harga pangan, kebijakan impor/ekspor, kebijakan cadangan pangan pemerintah. Untuk meningkatkan keterjangkauan perlu dilakukan intervensi dalam aspek distribusi berupa penyaluran pangan bersubsidi, penyaluran pangan untuk keadaan darurat dan operasi pasar untuk pengendalian harga pangan. Sementara itu dalam aspek konsumsi dapat dilakukan pemberian makanan tambahan untuk kelompok rawan pangan/gizi buruk, pemberian bantuan tunai untuk meningkatkan kemampuan mengakses pangan.

Kemampuan ekonomi merupakan salah satu factor penting yang menggambarkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhannya, terutama kebutuhan pangan yang cukup dan aman. Mengatasi kemiskinan artinya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan yang aman, dan bergizi, namun selain itu juga diperlukan adanya pola asuh dan pemberian makan yang tepat yang ditentukan oleh pengetahuan orang tua, terutama ibu. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah akses terhadap layanan kesehatan yang salah satunya dilakukan melalui program jaminan kesehatan sosial, sanitasi yang baik yang dapat menurunkan kejadian infeksi, dan

lingkungan yang aman. Apabila hal ini berjalan dengan baik dampaknya sensitif terhadap perbaikan gizi.

Upaya perbaikan gizi melalui intervensi spesifik yang dilakukan secara langsung terhadap sasaran yang rawan akan efektif apabila cakupannya ditingkatkan. Untuk meningkatkan cakupan intervensi gizi diperlukan adanya dukungan dari sector lainnya yang dalam hal ini disebut sebagai intervensi sensitif. Permasalahan yang diselesaikan oleh selain sector kesehatan adalah permasalahan mendasar yang mempengaruhi penyebab langsung kurang gizi, seperti kemiskinan, kerawanan pangan, akses terhadap pelayanan kesehatan (jaminan sosial), sanitasi dan akses terhadap air bersih, pendidikan anak usia dini, pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan perlindungan anak.

3.2 Intervensi Gizi Terintegrasi

Intervensi Gizi Terintegrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penurunan Prevalensi Stunting. Kerangka intervensi stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.

1) Intervensi Gizi Spesifik

Kegiatan ini merupakan intervensi yang berpengaruh secara langsung terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan oleh sector kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu relative pendek. Kegiatan intervensi gizi spesifik antara lain:

- a. Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri,
- b. Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK) dan pada balita kurus (Wasting);
- c. Pemberian obat cacing pada anak;
- d. Pemberian kapsul vitamin A pada anak usia 6-59 bulan, dan imunisasi dasar lengkap;

- e. Promosi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif serta konsumsi garam beryodium;
- f. Promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA); dan
- g. Advokasi dan Komunikasi Informasi serta Edukasi (KIE) 1000 Hari Pertama Kelahiran.

2) Intervensi Gizi Sensitif

Intervensi ini idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sector kesehatan dan berkontribusi sebesar 70 persen pada penurunan stunting. Sasaran dari intervensi gizi sensitive adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan terkait Intervensi Gizi sensitif dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang umumnya makro dan dilakukan secara lintas Kementerian dan Lembaga. Ada beberapa kegiatan yang dapat berkontribusi pada penurunan stunting melalui intervensi gizi sensitive antara sebagai berikut:

- a. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
- b. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi;
- c. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi;
- d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- e. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
- f. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
- g. memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- h. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- i. memberikan edukasi kesehatan reproduksi serta gizi pada remaja; dan
- j. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin.

Kedua kerangka intervensi stunting diatas sudah direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya nasional untuk mencegah dan mengurangi prevalensi stunting.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Penyusunan Tim RAD-PG disesuaikan dengan fungsi koordinasi dan fungsi teknis, sehingga setiap perangkat daerah melaksanakan peran dan fungsi sesuai kewenangannya. Adapun Tim RAD-PG Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis dengan susunan anggota dan tugas sebagai berikut :

I. Tim Pengarah

Tim Pengarah terdiri dari unsure kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah yang memberikan arahan terhadap RAD-PG mulai dari penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi.

Susunan Tim Pengarah terdiri atas :

- a. Penanggung Jawab : Gubernur Kalimantan Timur
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- c. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Timur
- d. Sekretaris : Kepala Dappeda Provinsi Kalimantan Timur
- e. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
 - 2. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
 - 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
 - 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
11. Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
12. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

II. Tim Teknis

Tim teknis terdiri dari perangkat daerah dan unit pelaksana teknis yang terkait dalam proses RAD-PG, yaitu :

- a. Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
- b. Sekretaris : Kabid Ekonomi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
- c. Anggota :
 1. Kasi Gizi dan Kesjaor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
 2. Kasi Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
 3. Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
 4. Kasi Data dan Informasi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

5. Kasubbag Perencanaan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
6. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
7. Kasi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
8. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur
9. Kasubbag Perencanaan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
10. Kasie Perencanaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
11. Kasubag Perencanaan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
12. Kasubbag Perencanaan Program Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
13. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda
14. Kepala Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim
15. Ketua Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda
16. Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
17. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
18. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

- d. Sekretariat :
1. Sekretaris Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
 2. Kasubag/Kasubbid Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
 3. Staf Bappeda dan Perangkat Daerah terkait

3.4 Peran Sektor Non Pemerintah

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.5 Instansi Pelaksana

Instansi yang akan mengimplementasikan rencana aksi ini secara umum adalah Perangkat Daerah/instansi vertikal yang terlibat, akan tetapi terbuka juga pada Perangkat Daerah/instansi vertikal lain, di luar yang dicantumkan dalam RAD-PG ini. Disamping itu juga dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.6 Pembiayaan

Pembiayaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi berasal APBD dari Pemerintah Daerah sesuai Peraturan perundang-undangan.

3.7 Strategi Pengembangan Kapasitas

Untuk melaksanakan program yang telah direncanakan, diperlukan adanya peningkatan kapasitas organisasi, sumber daya manusia, dan panduan pelaksanaan program atau kegiatan. Strategi pengembangan kapasitas yang dapat dilakukan adalah dengan cara berikut:

1) Pelatihan

Pelatihan merupakan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga program yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Pelatihan yang diberikan harus menunjang kompetensi SDM untuk melaksanakan perbaikan pangan dan gizi terutama pada 1000 HPK. Pelatihan dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu:

a. Pre Service Training

Kegiatan pre service training yang dilakukan meliputi pengembangan kurikulum yang sesuai dengan isu strategis gizi bagi perguruan tinggi atau pusat pelatihan tenaga kesehatan. Untuk memastikan hal ini salah satu yang dapat dilakukan adalah menjadikan adanya isu strategis pangan dan atau gizi dalam kurikulum rumpun ilmu kesehatan dan kurikulum ilmu pertanian yang bias dijadikan sebagai syarat akreditasi perguruan tinggi.

b. On the Job/In Service Training

Dengan adanya kurikulum dan modul pelatihan, dapat dilakukan pelatihan kepada tenaga yang terkait dengan 1000 HPK untuk mendukung berbagai kompetensi terkait 1000 HPK, diantaranya adalah komunikasi konseling, penyuluhan, dan praktik implementasi intervensi seperti inisiasi menyusui dini (IMD) dan pembuatan MP ASI, STBM, penganekaragaman pangan, penyuluhan pertanian, parenting, PAUD, kesehatan reproduksi. Diperlukan adanya pengelola pelatihan ini di tingkat pusat dan daerah. Materi untuk on the job training disediakan oleh tim khusus yang dikoordinasikan oleh Pokja Pelatihan Gernas 1000 HPK dan di tingkat daerah berkoordinasi dengan Bappeda dipimpin oleh bupati, walikota dan gubernur.

c. Pedoman Teknis

Setiap kementerian/lembaga dapat menerbitkan pedoman teknis sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

3.8. Strategi Advokasi dan Komunikasi

Advokasi merupakan strategi untuk meningkatkan komitmen para pengambil keputusan. Advokasi perlu dilakukan kepada pihak yang berkaitan dengan pembangunan pangan dan gizi.

Dalam rangka menjamin pencapaian Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, maka perlu dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemantauan dan evaluasi RAD-PG Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dilakukan secara internal oleh Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lain yang dikoordinir oleh BAPPEDA Provinsi. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja baik indikator masukan, proses, keluaran dan manfaat maupun dampak. Tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah :

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan RAD-PG;
2. Mengidentifikasi permasalahan serta tantangan yang timbul dan/atau akan timbul dari pelaksanaan RAD-PG;
3. Memberikan penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil kegiatan RAD-PG yang sedang berlangsung atau yang telah selesai; dan
4. Menyiapkan rekomendasi bagi pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi berikutnya.

4.1 Indikator - indikator dalam RAD-PG 2019-2023 yang dipantau dan di Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD-PG Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, dilakukan untuk mengetahui pencapaian indikator kinerja *utama/ output* dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi selain mencakup indikator input, proses, dan output, juga dapat dilakukan pada indikator *outcome* dan *impact*. Indikator kinerja utama/indikator *ouput* RAD PG Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

4.2 Waktu dan Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

Monitoring pelaksanaan RAD-PG Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dilakukan minimal dua kali setahun terdiri dari pertengahan dan akhir tahun yang diikuti seluruh pemangku kepentingan terkait

dengan RAD-PG Provinsi. Sedangkan kegiatan evaluasi dilakukan sekali setahun dan untuk evaluasi *outcome* dan *impact*, dapat dilakukan pada *mid-term* dan akhir periode pelaksanaan RAD-PG Provinsi dan atau difasilitasi oleh pemerintah pusat. Selain indikator *ouput* yang dimonitoring dan dievaluasi setiap tahunnya, pada akhir periode RAD-PG Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 juga akan dilakukan evaluasi *outcome* dari dokumen tersebut yang meliputi: (1) Skor Pola Pangan Harapan; (2) Angka Kecukupan Energi (KKal/Hari); (3) Angka Kecukupan Protein (KKal/Hari); (4) Produksi padi (gabah kering giling) (juta ton); (5) Produksi jagung (juta ton); (6) Produksi daging (juta ton); (7) Konsumsi ikan (kg/perkapita/tahun); (8) Konsumsi Daging (kg/perkapita/tahun); (9) Konsumsi sayur dan buah(gr/perkapita/tahun); (10) Prevalensi kurus (*wasting*) pada anak balita (persen); (11) Prevalensi pendek dan sangat pendek (*stunting*) pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) (persen); (12) Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia >18 tahun (persen). Waktu/frekuensi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD-PG Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 4.2.

4.3 Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Laporan hasil monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan RAD-PG, serta tantangan dan kebijakan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun. Bentuk pelaporan hasil RAD-PG Provinsi Kalimantan Timur mencakup :

1. Program, jumlah kegiatan berdasarkan program, dan pendanaan (anggaran dan realisasi anggaran);
2. Identifikasi masalah berdasarkan pilar yang ada;
3. Capaian target berdasarkan indikator setiap Perangkat Daerah.

Laporan hasil RAD-PG dikoordinir oleh Bappeda Provinsi, dan menyampaikan laporan kepada Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, pada akhir semester pertama dan akhir semester kedua.

Tabel 4.1
Indikator – Indikator Program/Kegiatan dalam RAD-PG Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang di Monitoring dan di Evaluasi

No	PILAR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1	PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Penyuiuhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai saluran komunikasi pertahun (kali)	APBN	Dinas Kesehatan
2		Pengadaan PMT dan Distribusi untuk Penurunan Stunting	Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan Makanan Tambahan	DAK	Dinas Kesehatan
3		Pengembangan PMT Lokal Untuk Ibu Hamil dan Balita	Persentase Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan	APBN	Dinas Kesehatan
4		Pembinaan dalam rangka Pemantauan Kasus Gizi Buruk	Jumlah Kab/Kota yang dibina untuk perbaikan gizi	APBD	Dinas Kesehatan
5		Pengadaan Tablet Tambah Darah Untuk Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	APBD	Dinas Kesehatan
6		Pengadaan Tablet Tambah Darah Untuk Remaja Putri	Persentase Remaja Putri yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)	DAK	
7		Pelacakan/ Pembinaan Teknis dan Monev Terpadu Kegiatan Pembinaan Gizi	Persentase Bayi usia kurang dari 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	APBN	Dinas Kesehatan
	Persentase yang Baru Lahir yang Mendapat IMD		APBN		

No	PILAR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
8		Imunisasi pada bayi dan baduta	Imunisasi dasar lengkap pada bayi	APBN	Dinas Kesehatan
9		Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS)	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan remaja	APBN	Dinas Kesehatan
10		POPM Kecacingan	Persentase anak yang minum obat cacing	APBN	Dinas Kesehatan
11		Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Persentase sekolah yang mendapatkan Pelayanan Penjangkaran Kesehatan bagi Peserta Didik Kelas 1, 7, dan 10	APBN	Dinas Kesehatan
12		Pembinaan dan Monev Kesehatan Keluarga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Kelas Ibu Hamil	APBN	Dinas Kesehatan
13		Pembinaan dalam peningkatan pelayanan antenatal	Persentase ibu hamil yang memeriksakan kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan sesuai standar (K4)	APBN	Dinas Kesehatan
14		Advokasi dan KIE 1000 HPK	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kualitas keluarga	APBD	DKP3A
15		Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Remaja Sebaya diluar sekolah	Jumlah remaja sebaya diluar sekolah dalam kesehatan reproduksi remaja	APBD	BKKBN / Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16		Forum pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)	APBD	BKKBN / Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17		Pendidikan Keluarga	Pendidikan Keluarga di Sekolah Provinsi Kalimantan Timur	APBD	Dinas Pendidikan

No	PILAR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
18		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	APBD	Dinas Pendidikan
19		Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin	Terbinanya Catin	APBD	Kemenag
20		Bimbigan Perkeawinan usia remaja	Terbinanya Catin Usia Remaja	APBD	
21		Kegiatan Pembinaan Keluarga Sukinah	Jumlah keluarga yang memperoleh pembinaan keluarga sukinah	APBD	Kemenag
22		Kegiatan Pembinaan Keluarga Hitta Sukhaya	Jumlah keluarga yang memperoleh pembinaan pembinaan keluarga Hitta Sukhaya	APBD	Kemenag
23		Kegiatan Pembinaan Keluarga Bahagia	Jumlah keluarga yang memperoleh pembinaan pembinaan keluarga Bahagia	APBD	Kemenag
24		Kegiatan Pembinaan Keluarga Kristen	Jumlah keluarga yang memperoleh pembinaan pembinaan keluarga Kristiani	APBD	Kemenag
25		Pembinaan UKS Madrasah/Pesantren	Jumlah UKS di Madrasah/Pesantren yang dibina	APBD	Kemenag
26		Pengembangan dan Monitoring Lembaga serta Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Posyandu yang dibina	APBD	DPMPDes
27		Kegiatan Pemeriksaan Kehamilan sebanyak 4 Kali	Jumlah ibu hamil penerima Bantuan PKH (Orang)	APBN	Dinas Sosial
28		Kemitraan Bagi Pasien Kurang Mampu, Non BPJS	Jumlah penduduk miskin dan tidkak mampu yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	APBD	Dinas Kesehatan

No	PILAR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH	
			Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program JKN menuju UHC	APBD		
29	PENINGKATAN AKSESIBILITAS PANGAN YANG BERAGAM	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Luas tanam padi	APBD	Dinas Pangan TPH	
30		Peningkatan Produksi Hortikultura	Produktivitas tanaman pangan hortikultura	APBD	Dinas Pangan TPH	
31		Pengembangan Perbibitan Ternak	Jumlah ternak sapi bibit yang memiliki SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)	Service per Conception	APBD	Dinas Peternakan
32		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap yang Dibina	Indeks Kesejahteraan Nelayan (NTN)	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
33	Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Jumlah Unit Pembenihan yang bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)	Jumlah Unit Pembudidayaan Ikan yang bersertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) skala kecil dan skala besar	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan	

No	PILAR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
			Jumlah Sampel Produk Perikanan Budidaya yang diuji minimal 96% bebas residu		
34		Kegiatan pengembangan usaha perikanan dan kelautan	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Bidang Lahan Budidaya yang disiapkan sertifikatnya		
			Indeks Kesejahteraan Pembudidaya Ikan		
35		Kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan produksi perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan dan Sertifikasi	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran		
36		Kegiatan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Fasilitas (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Volume Ekspor Perikanan		Dinas Kelautan dan Perikanan
37		Pengembangan Pangan Lokal	Jumlah produk olahan pangan lokal yang dikembangkan	APBD	Dinas Pangan TPH

No	PILAR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
36		Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Jumlah Fasilitas penyediaan bahan pokok dan penting	APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
39		Perdagangan Dalam Negeri	Rata-rata Rentang Waktu Kecukupan Stok Barang dan Barang Penting	APBD	
40		Perdagangan Luar Negeri	Jumlah Eksportir yang mendapatkan fasilitasi	APBD	
41		Kerjasama Perdagangan	jumlah UKM yang menjalin Kerjasama Perdagangan	APBD	
42		Kegiatan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Fasilitas (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Volume Ekspor Perikanan		
43		Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Data ketersediaan dan kerawanan pangan	APBD	Dinas Pangan TPH
44		Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	Peningkatan Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
45	Penerapan dan Pengamanan Standarisasi Jaminan Mutu Barang	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengujian, Kalibrasi dan Lembaga Sertifikasi	APBD		
46	MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	APBN	BBPOM
47		Desa Pangan Aman	Jumlah Desa Pangan Aman yang Diintervensi	APBN	BBPOM
48		Pengawasan Mutu Pangan Segar	Jumlah Sertifikat mutu pangan segar asal tumbuhan	APBD	DPTPH

No	PILAR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
49		Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak	Jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	APBD	DPKH
50		Kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan produksi perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan dan Sertifikasi (UMKM)	APBD	DKP
			Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran (Izin)		
51		Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Jumlah pasar yang diintervensi menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (sebagai Pilot Project)		BBPOM
52		Pengawasan Mutu Pangan Segar	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman	APBN	BBPOM
53		Kegiatan Pengawasan Pangan, baik yang terregistrasi MD maupun P-IRT di Provinsi Kalimantan Timur	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	APBN	BBPOM
			Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		
			Persentase Makanan yang memenuhi syarat		
54		Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi	APBD	DISPERINDAG

No	PILAR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
			Jumlah Barang Beredar Yang Wajib Diawasi (Produk)		
55		Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan	Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan yang dilakukan pendampingan	APBD	DPKH
56		Penyebaran Informasi melalui pameran / Expo	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	APBN	BBPOM
57	PHBS	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2TB untuk mencapai CDR=>70% dan SR=>90%	APBD	Dinas Kesehatan
			Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2HIV untuk mencapai presentase ODHA yang mendapatkan ARV => 55%		
			Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 Malaria untuk mencapai persentase pengobatan Malaria Positif sesuai standart =>95%		
			Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 DBD		
58		Peningkatan surveillace epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam pencapaian IDL	APBD	Dinas Kesehatan

No	PILAR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
			Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam pencapaian persentase respon kewaspadaan kejadian luar biasa		
			Jumlah Kab/Kota yang melakukan sosialisasi dan membuat rencana kontijensi wabah/bencana		
59		1) Pelayanan informasi kebijakan daerah	Jumlah baliho yang menginformasikan kebijakan daerah	APBD	
60		2) Komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi	Dialog Interaktif di RRI dan TVRI	APBD	Dinas Komunikasi
61		3) Dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah	Jumlah Laporan Dokumentasi dan Publikasi Program/ Kegiatan Perangkat Daerah	APBD	
			Jumlah PD provinsi yang dilakukan pembinaan deteksi dini faktor resiko PTM dan implementasi KTR	APBD	
62		Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan implementasi KTR minimal di 50% sekolah	APBD	Dinas Kesehatan
			Jumlah Kab/Kota yang mempunyai min 50% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu PTM (kasus Hipertensi & DM)	APBD	

No	PILAR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
			Jumlah Kab/Kota yang min 50% Puskesmasnya melaksanakan deteksi dini kanker payudara pada perempuan usia 30-50 tahun	APBD	
63		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	Jumlah SPAM (unit)	APBD	Dinas PU PR
64		Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Keciptakarya	Jumlah Gedung yang disusun perencanaannya (unit)	APBD	Dinas PU PR
			Jumlah SPAM, IPAL, IPLT dan TPA yang disusun Perencanaannya (unit)		
			Jumlah pembangunan infrastruktur yang dilakukan pengawasan (Unit)		
65	KOORDINASI PANGAN DAN GIZI	Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Desa	Kabupaten Yang Berhasil Dibina	APBD	DPMPDes
66		Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen administrasi kependudukan	APBD	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
67		Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Jumlah pameran yang diikuti	APBD	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
68		Bina Aparatur Pencatatan Sipil	Jumlah perangkat daerah FGD perlindungan anak dalam penanggulangan bencana	APBD	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	PILAR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
69		Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah kegiatan penguatan OPD/Lintas Sektor yang mengimplementasikan kebijakan publik berwawasan kesehatan (kali)	APBD	Dinas Kesehatan
			Jumlah penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai saluran komunikasi pertahun (kali)		
			Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan penilaian (posyandu dan PHBS) dalam setahun		
			Jumlah Rumah Sakit di Kalimantan Timur yang dilakukan pembinaan PKRS		
70		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial (Laporan)	APBD	Bappeda
			Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)		
71		Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Tersedia Cadangan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi	APBD	Dinas Pangan TPH
72		Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Data ketersediaan dan kerawanan pangan (Laporan)	APBD	Dinas Pangan TPH
73		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Did Pertanian dan Perikanan	APBD	Bappeda dan seluruh PD

Tabel 4.2

Waktu / Frekuensi Pemantauan dan Evaluasi Indikator RAD-PG
Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

No	PILAR	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	FREKUENSI PEMANTAUAN	FREKUENSI EVALUASI
1	PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Dinas Kesehatan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
2		Pengadaan PMT dan Distribusi untuk Penurunan Stunting	Dinas Kesehatan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
3		Pengembangan PMT Lokal Untuk Ibu Hamil dan Balita	Dinas Kesehatan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
4		Pembinaan dalam rangka Pemantauan Kasus Gizi Buruk	Dinas Kesehatan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
5		Pengadaan Tablet Tambah Darah Untuk Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
6		Pengadaan Tablet Tambah Darah Untuk Remaja Putri		6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
7		Pelacakan/ Pembinaan Teknis dan Monev Terpadu Kegiatan Pembinaan Gizi	Dinas Kesehatan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
8		Imunisasi pada bayi dan baduta	Dinas Kesehatan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
9		Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS)	Dinas Kesehatan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali

No	PILAR	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	FREKUENSI PEMANTAUAN	FREKUENSI EVALUASI
10		POPM Kecacingan	Dinas Kesehatan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
11		Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Dinas Kesehatan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
12		Pembinaan dan Money Kesehatan Keluarga	Dinas Kesehatan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
13		Pembinaan dalam peningkatan pelayanan antenatal	Dinas Kesehatan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
14		Advokasi dan KIE 1000 HPK	DKP3A	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
15		Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Remaja Sebaya diluar sekolah	BKKBN / Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
16		Forum pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	BKKBN / Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
17		Pendidikan Keluarga	Dinas Pendidikan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
18		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
19		Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin	Kemenag	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
20		Bimbigan Perkeawinan usia remaja		6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali

No	PILAR	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	FREKUENSI PEMANTAUAN	FREKUENSI EVALUASI	
21		Kegiatan Pembinaan Keluarga Sukinah	Kemenag	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali	
22		Kegiatan Pembinaan Keluarga Hitta Sukhaya	Kemenag	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali	
23		Kegiatan Pembinaan Keluarga Bahagia	Kemenag	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali	
24		Kegiatan Pembinaan Keluarga Kristen	Kemenag	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali	
25		Pembinaan UKS Madrasah/Pesantren	Kemenag	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali	
26		Pengembangan dan Monitoring Lembaga serta Organisasi Masyarakat Perdesaan	DPMPDes	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali	
27		Kegiatan Pemeriksaan Kehamilan sebanyak 4 Kali	Dinas Sosial	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali	
28		Kemitraan Bagi Pasien Kurang Mampu, Non BPJS	Dinas Kesehatan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali	
29		PENINGKATAN AKSESIBILITAS PANGAN YANG BERAGAM	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Dinas Pangan TPH	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
30			Peningkatan Produksi Hortikultura	Dinas Pangan TPH	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali

No	PILAR	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	FREKUENSI PEMANTAUAN	FREKUENSI EVALUASI
31		Pengembangan Perbibitan Ternak	Dinas Peternakan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
32		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
33		Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Dinas Kelautan dan Perikanan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
34		Kegiatan pengembangan usaha perikanan dan kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
35		Kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan produksi perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
36		Kegiatan Pemasaran Produksi Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
37		Pengembangan Pangan Lokal	Dinas Pangan TPH	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
38		Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
39		Perdagangan Dalam Negeri		6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali

No	PILAR	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	FREKUENSI PEMANTAUAN	FREKUENSI EVALUASI
40		Perdagangan Luar Negeri		6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
41		Kerjasama Perdagangan		6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
42		Kegiatan Pemasaran Produksi Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
43		Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Dinas Pangan TPH	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
44		Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
45	Penerapan dan Pengamanan Standarisasi jaminan Mutu Barang	6 Bulan Sekali		1 Tahun Sekali	
46	MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	BBPOM	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
47		Desa Pangan Aman	BBPOM	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
48		Pengawasan Mutu Pangan Segar	DPTPH	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
49		Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak	DPKH	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
50		Kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan produksi perikanan	DKP	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali

No	PILAR	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	FREKUENSI PEMANTAUAN	FREKUENSI EVALUASI
51		Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	BBPOM	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
52		Pengawasan Mutu Pangan Segar	BBPOM	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
53		Kegiatan Pengawasan Pangan, baik yang terregistrasi MD maupun P-IRT di Provinsi Kalimantan Timur	BBPOM	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
54		Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	DISPERINDAG	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
55		Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan	DPKH	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
56		Penyebaran Informasi melalui pameran / Expo	BBPOM	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
57	PHBS	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Dinas Kesehatan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
58		Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Dinas KEsehatan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
59		1) Pelayanan informasi kebijakan daerah	Dinas Komunikasi	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
60		2) Komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi		6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali

No	PILAR	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	FREKUENSI PEMANTAUAN	FREKUENSI EVALUASI
61		3) Dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah		6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
62		Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Dinas Kesehatan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
63		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	Dinas PU PR	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
64		Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Keciptakarya	Dinas PU PR	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
65		Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Desa	DPMPDes	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
66	KOORDINASI PANGAN DAN GIZI	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
67		Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
68		Bina Aparatur Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
69		Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Dinas Kesehatan	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali

No	PILAR	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	FREKUENSI PEMANTAUAN	FREKUENSI EVALUASI
70		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Bappeda	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
71		Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Dinas Pangan TPH	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
72		Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Dinas Pangan TPH	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali
73		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Bappeda dan seluruh PD	6 Bulan Sekali	1 Tahun Sekali

Pembangunan pangan dan gizi merupakan rangkaian aktivitas pembangunan multi sektor, mulai dari aspek produksi pangan sampai dengan aspek konsumsi, yang didalamnya terdapat keterlibatan berbagai sektor. Pentingnya keterlibatan setiap sector dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, tidak hanya berfokus pada pemecahan permasalahan pangan dan gizi secara terpisah, namun juga memperhatikan peran multi sektor. Oleh karena itu, dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan pembangunan SDM melalui peningkatan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.

RAD-PG Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 menjadi pedoman bagi seluruh *stakeholder* pembangunan di Kalimantan Timur dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu RAD Pangan dan Gizi terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah maupun dalam jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD ataupun dalam Renja SKPD. Implementasi dan pencapaian RAD Pangan dan Gizi ini perlu didukung melalui sinergitas program dan pendanaan yang berasal dari Pemerintah (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD), meskipun tidak menutup kemungkinan dukungan pendanaan yang berasal swasta dan masyarakat.

Tabel 5. Target Sasaran Utama Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Status Awal (2018)	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
1.	Skor Pola Pangan Harapan	84,6	84,7	86,9	89,1	91,2	93,4
2.	Angka Kecukupan Energi (KKal/Hari)	1.999	2.024	2.049	2.075	2.100	2.125
3.	Angka Kecukupan Protein (KKal/Hari)	62	67,9	67	67,1	67,2	67,3
4	Produksi padi (gabah kering giling) (juta ton);	383.958	403.000	423.000	444.000	466.000	495.000
5	Produksi jagung (juta ton):	80.000	90.000	100.000	105.000	110.000	120.000
6	Produksi daging (juta ton);	8,31	8,61	8,93	9,25	9,59	9,95
7	Konsumsi ikan (kg/perkapita/tahun);	45	50	52	54	56	58
8	Konsumsi Daging (kg/perkapita/tahun)	17,5	17,7	17,9	18,1	18,2	18,5
9	Konsumsi sayur dan buah(gr/perkapita/tahun)	210	287	364	441	518	671
10	Prevalensi kurus (wasting) pada anak balita (persen)	7,5	7,2	6,9	6,6	6,3	6
11	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) (persen)	29,4	29,1	28,8	28,6	28,3	28
12	Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia >18 tahun (persen)	28,7	27,7	25,7	23,7	21,7	19,7

Tabel 6 Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja RAD-PG Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	SUB PILAR	INDIKASI KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal 2018	Target									PERANGKAT DAERAH		
							2019		2020		2021		2022		2023			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
PILAR 1: PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT																		
	promosi dan pendidikan gizi masyarakat;	Penyebarluasan Informasi	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai saluran komunikasi pertahun (kali)	5	5	924.100.000,0	5	903.340.000	5	903.340.000	5	903.340.000	5	903.340.000	Dinas Kesehatan	
		Pemberian PMT	Program Pembinaan Gizi Masyarakat	Pengadaan PMT dan Distribusi untuk Penurunan Stunting	Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan Makanan Tambahan	91,63%	95%	2.990.063.000	96%	3.289.069.300	97%	3.617.976.230	98%	3.979.773.853	99%	4.377.751.238	Dinas Kesehatan	
				Pengembangan PMT Lokal Untuk Ibu Hamil dan Balita	Persentase Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan	93,94%	90%	50.000.000	91%	60.000.000	92%	72.000.000	93%	86.400.000	94%	103.680.000	Dinas Kesehatan	
				Pembinaan dalam rangka Pemantauan Kasus Gizi Buruk	Jumlah Kab/Kota yang dibina untuk perbaikan gizi	10	10	75.000.000	10	90.000.000	10	108.000.000	10	129.600.000	10	155.520.000	Dinas Kesehatan	
		Pemberian TTD	Program Pembinaan Gizi Masyarakat	Pengadaan Tablet Tambah Darah	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama	84,24%	98%	882.000.000	98%	970.200.000	98%	1.067.220.000	98%	1.173.942.000	98%	1.291.336.200	Dinas Kesehatan	
				Pengadaan Tablet Tambah Darah Untuk Remaja Putri	Persentase Remaja Putri yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)	17,01%	32%	910.000.000	31%	819.000.000	30%	737.100.000	29%	663.390.000	28%	597.051.000		
		Pemberian ASI Eksklusif, IMD (Inisiasi Menyusui Dini), dan KN1 (Kunjungan Neonatus KN1)	Program Pembinaan Gizi Masyarakat	Pelacakan/ Pembinaan Teknis dan Monev Terpadu Kegiatan Pembinaan Gizi	Persentase Bayi usia kurang dari 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	70,07%	50%	169.920.000	55%	186.912.000	60%	205.603.200	65%	226.163.520	70%	248.779.872	Dinas Kesehatan	
					Persentase yang Baru Lahir yang Mendapat IMD	76,95%	50%		55%		60%		65%		70%			
		Cakupan Imunisasi	Program Pencegahan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3i)	Imunisasi pada bayi dan baduta	Imunisasi dasar lengkap pada bayi	93,30%	93,30%		93,50%		94%		94,5%		95%	Dinas Kesehatan		
	pelayanan kesehatan dan masalah gizi;	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	Program Kesehatan Keluarga	Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS)	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan remaja	51,87 %	55%	110.160.000	60%	200.000.000	65%	250.000.000	70%	300.000.000	75%	350.000.000	Dinas Kesehatan	
			Angka Kecacangan	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacangan	POPM Kecacangan	Persentase anak yang minum obat cacang	84,86%	75%		75%		75%		75%		75%	Dinas Kesehatan	
			Penjaringan anak sekolah	Program Kesehatan Keluarga	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Persentase sekolah yang mendapatkan Pelayanan Penjaringan Kesehatan bagi Peserta Didik Kelas 1, 7, dan 10	55%	55%	164.095.000	60%	250.000.000	65%	300.000.000	70%	350.000.000	75%	400.000.000	Dinas Kesehatan
			Kelas Ibu Hamil		Pembinaan dan Monev Kesehatan Keluarga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Kelas Ibu Hamil	89,94%	90%	2.766.355.000	90%	3.000.000.000	90%	3.500.000.000	90%	4.000.000.000	90%	4.500.000.000	Dinas Kesehatan

No	SUB PILAR	INDIKASI KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target										PERANGKAT DAERAH		
						Kondisi Awal		2019		2020		2021		2022			2023	
						2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
		Kontak Minimal 4 Kali Selama Kehamilan (K4)		Pembinaan dalam peningkatan pelayanan antenatal	Persentase ibu hamil yang memeriksakan kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan sesuai standar (K4)	86,38%	88*%		91%		94%		97%		100%		Dinas Kesehatan	
pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi.		KIE tentang kesehatan Bayi dibawah dua tahun, Balita dll	Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Advokasi dan KIE 1000 HPK	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kualitas keluarga	60			100	250.000.000	15	350.000.000	15	400.000.000	15	450.000.000	DKP3A	
		Pembinaan KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) melalui GenRe	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Remaja Sebaya diluar sekolah	Jumlah remaja sebaya diluar sekolah dalam kesehatan reproduksi remaja	500	100		100		100		100		100		BKKBN / Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Kesehatan Reproduksi Remaja	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Forum pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)	500	100	95.000.000	15	250.000.000,00	330	200.000.000,00	340	250.000.000,00	350	250.000.000,00	BKKBN / Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Pendidikan Keluarga			Pendidikan Keluarga di Sekolah Provinsi Kalimantan Timur			173.000.000		173.000.000		173.000.000		173.000.000		173.000.000	Dinas Pendidikan	
		Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS)	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	10	10	650.000.000	10	650.000.000	10	1.806.100.000	10	2.648.000.000	10	3.520.000.000	Dinas Pendidikan	
		Bimbingan kursus pra nikah	Program Bimbingan Masyarakat Islam	Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin	Terbinanya Catin	2236 Orang	2500 orang	885.000.000	2500 orang	885.000.000	2500 orang	885.000.000	2500 orang	885.000.000	2500 orang	885.000.000	Kemenag	
				Bimbingan Perkeawinan usia remaja	Terbinanya Catin Usia Remaja	330 Orang	1000 Orang	177.440.000	1000 Orang	177.440.000	1000 Orang	177.440.000	1000 Orang	177.440.000	1000 Orang	177.440.000		
		Pembinaan Keluarga Sakinah, Sukinah, Hita	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	Kegiatan Pembinaan Keluarga Sukinah	Jumlah keluarga yang memperoleh pembinaan keluarga sukinah	50 Orang	50 Orang	72.500.000	50 Orang	72.500.000	50 Orang	72.500.000	50 Orang	72.500.000	50 Orang	72.500.000	Kemenag	
				Kegiatan Pembinaan Keluarga Hitta Sukhaya	Jumlah keluarga yang memperoleh pembinaan pembinaan keluarga Hitta Sukhaya	400 Orang	400 Orang	29.852.000	400 Orang	35.000.000	400 Orang	35.000.000	400 Orang	35.000.000	400 Orang	35.000.000	Kemenag	

No	SUB PILAR	INDIKASI KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal 2018	Target										PERANGKAT DAERAH
							2019		2020		2021		2022		2023		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Sukayah, dan Keluarga Bahagia	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	Kegiatan Pembinaan Keluarga Bahagia	Jumlah keluarga yang memperoleh pembinaan pembinaan keluarga Bahagia	30 Orang	30 Orang	49.525.000	30 Orang	49.525.000	30 Orang	49.525.000	30 Orang	49.525.000	30 Orang	49.525.000	Kemenag
			Program Bimbingan Masyarakat Kristen	Kegiatan Pembinaan Keluarga Kristen	Jumlah keluarga yang memperoleh pembinaan pembinaan keluarga Kristiani	0	33 Orang	100.000.000	50 Orang	158.730.000	50 Orang	158.730.000	50 Orang	158.730.000	50 Orang	158.730.000	Kemenag
		UKS di Madrasah dan Pesantren	Program Pendidikan Islam	Pembinaan UKS Madrasah/Pesantren	Jumlah UKS di Madrasah/Pesantren yang dibina	39 UKS	39 UKS	59.000.000	59	59.000.000	59	59.000.000	59	59.000.000	59	59.000.000	Kemenag
		Fasilitasi dalam peningkatan termasuk penguatan kelembagaan posyandu dalam pelayanan sosial dasar masyarakat	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pengembangan dan Monitoring Lembaga serta Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Posyandu yang dibina	0	6 Lembaga	153.500.000	6 Lembaga	450.000.000	6 Lembaga	310.000.000	6 Lembaga	325.000.000	6 Lembaga	325.000.000	DPMPDes
		Program Keluarga Harapan (PKH)	Program Verifikasi Kesehatan	Kegiatan Pemeriksaan Kehamilan sebanyak 4 Kali	Jumlah ibu hamil penerima Bantuan PKH (Orang)	23.549 orang	24019	57.645.600.000	24499	58.797.600.000	24387	59.968.800.000	25486	61.166.400.000	25995	62.388.000.000	Dinas Sosial
	Jaminan sosial yang mendukung perbaikan pangan dan gizi;	JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan	Kemitraan Bagi Pasien Kurang Mampu, Non BPJS	Jumlah penduduk miskin dan tidak mampu yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	0	131743	41.478.068.000	132000	41.500.000.000	132000	41.500.000.000	132000	41.000.000.000	132000	41.500.000.000	Dinas Kesehatan
					Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program JKN menuju UHC	3	dd		10		10		10		10		
PILAR II : PENINGKATAN AKSESIBILITAS PANGAN YANG																	
	produksi pangan dalam negeri/daerah;	Produksi pangan	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Luas tanam padi	1000	23000	8.387.980.000	24000	10.000.000.000	25000	10.000.000.000	26000	11.500.000.000	27000	11.000.000.000	Dinas Pangan TPH
			Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Peningkatan Produksi Hortikultura	Produktivitas tanaman pangan hortikultura	2	2,16	1.548.900.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.250.000.000	2	2.000.000.000	Dinas Pangan TPH
			Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Pengembangan Perbibitan Ternak	Jumlah ternak sapi bibit yang memiliki SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)	50	100	4.100.000.000	100	20.700.000.000	120	5.500.000.000	140	6.000.000.000	150	6.500.000.000	Dinas Peternakan
					Service per Conception	2	1,8		1,75		1,7		1,65		1,6		
		Produksi ikan dan hasil laut dan olahannya	Program pengembangan perikanan tangkap	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap yang Dibina	1224	60	3.028.300.000	60	3.685.000.000	60	4.053.500.000	60	4.458.850.000	60	4.458.850.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Indeks Kesejahteraan Nelayan (NTN)	115,2	100		100		100		100		100		


No	SUB PILAR	INDIKASI KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal	Target												PERANGKAT DAERAH
						2018	2019		2020		2021		2022		2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Jumlah Unit Pembenhian yang bersertifikat CPIB (Cara Pembenhian Ikan yang Baik)		5		5		5		5		5			Dinas Kelautan dan Perikanan	
					Jumlah Unit Pembudidayaan Ikan yang bersertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) skala kecil dan skala besar	50	55	2.115.705.000	60	2.365.000.000	65	2.601.500.000	70	2.861.650.000	75	2.861.650.000			
					Jumlah Sampel Produk Perikanan Budidaya yang diuji minimal 96% bebas residu	83	60		60		60		60		60				
				Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	10	12		14		16		18		20			Dinas Kelautan dan Perikanan	
					Jumlah Bidang Lahan Budidaya yang disiapkan sertifikatnya		219	884.600.000	225	1.815.000.000	250	1.996.500.000	300	2.196.150.000	350	2.196.150.000			
					Indeks Kesejahteraan Pembudidaya Ikan	92	100		100		100		100		100				
				Kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan produksi perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan dan Sertifikasi	22	20	688.000.000	20	825.000.000	20	907.500.000	20	998.250.000	20	998.250.000		Dinas Kelautan dan Perikanan	
					Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran	58	40		40		40		40		40				
				Kegiatan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Fasilitasi (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	2	4	437.525.000	4	550.000.000	4	605.000.000	4	665.500.000	4	665.500.000		Dinas Kelautan dan Perikanan	
					Volume Ekspor Perikanan	2800	2850		2900		2850		3000		3050			Dinas Kelautan dan Perikanan	
	penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal,	Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Program Pengenekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Pengembangan Pangan Lokal	Jumlah produk olahan pangan lokal yang dikembangkan	5	7	400.000.000	9	850.000.000	11	850.000.000	13	900.000.000	15	850.000.000		Dinas Pangan TPH	
	distribusi pangan,		Program peningkatan efisiensi perdagangan	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Jumlah Fasilitasi penyediaan bahan pokok dan penting	40	42	307600000										Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Perdagangan Dalam Negeri	Rata-rata Rentang Waktu Kecukupan Stok Barang dan Barang Penting				3 bulan	1.062.700.000	4bulan	1.109.630.000	4bulan	1.158.920.000	4bulan	1.210.700.000			
			Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Perdagangan Luar Negeri	Jumlah Ekspor yang mendapatkan fasilitasi				60 Ekspor	1.219.500.000	70 Ekspor	1.332.484.000	80 Ekspor	1.462.576.000	90 Ekspor	1.612.527.000			

No	SUB PILAR	INDIKASI KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal	Target										PERANGKAT DAERAH
						2018	2019		2020		2021		2022		2023		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Kerjasama Perdagangan	jumlah UKM yang menjalin Kerjasama Perdagangan				10 UKM	1.295.280.000	12 UKM	1.424.800.000	14 UKM	1.567.280.000	16 UKM	1.724.020.000	
	konsumsi kalori, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral;	Gemari (Gemar Makan Ikan)	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Kegiatan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Fasilitas (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	2	4	437.525.000	4	550.000.000	4	605.000.000	4	665.500.000	4	665.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Volume Ekspor Perikanan	2800	2850		2900		2950		3000		3050		
		kawasan mandiri pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Data ketersediaan dan kerawanan pangan	4	4	440.000.000	4	850.000.000	4	850.000.000	4	900.000.000	4	850.000.000	Dinas Pangan TPH
	peningkatan akses pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.	Standarisasi pada industri makanan, hasil laut, dan perikanan (RSNI/SNI Wajib)	Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang	Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	Peningkatan Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	1700	1785	422.000.000	165	579.784.000	169	642.875.000	172	663.060.000	175	678.140.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Penerapan dan Pengamanan Standarisasi Jaminan Mutu Barang	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengujian, Kalibrasi dan Lembaga Sertifikasi	3 Komoditi, 12 Ruang Lingkup	3 Komoditi, 12 Ruang Lingkup	1.502.400.000	4 Komoditi, 14 Ruang Lingkup	1.810.784.000	5 Komoditi, 15 Ruang Lingkup	1.949.875.000	6 Komoditi, 16 Ruang Lingkup	2.036.060.000	7 Komoditi, 18 Ruang Lingkup	2.119.140.000	
PILAR III : MUTU DAN KEAMANAN PANGAN																	
	pengawasan regulasi dan standar gizi;	Pengawasan sarana produksi obat, Desa Pangan Aman (Paman)	Program : Pengawasan Obat dan Makanan	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50	50	1.473.397.000									BBPOM
				Desa Pangan Aman	Jumlah Desa Pangan Aman yang Diintervensi	21	24	568.727.000	27	682.474.000	30	818.968.800	33	982.762.560	36	1.179.315.072	BBPOM
	pengawasan keamanan pangan segar;	Intervensi pasar aman	Program Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Pengawasan Mutu Pangan Segar	Jumlah Sertifikat mutu pangan segar asal tumbuhan	3	5	600.000.000	7	850.000.000	9	850.000.000	11	850.000.000	13	850.000.000	DPTPH
			Program Hilirisasi Produk Peternakan	Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak	Jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	30	30	272.000.000	30	950.000.000	30	350.000.000	30	400.000.000	30	450.000.000	DPKH
			Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan produksi perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan dan Sertifikasi (UMKM)	22	20	688.000.000	20	825.000.000	20	907.500.000	20	998.250.000	20	998.250.000	DKP
					Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran (Izin)	58	40		40		40		40		40		
			Program : Pengawasan Obat dan Makanan	Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Jumlah pasar yang diintervensi menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (sebagai Pilot Project)	4	5	293.985.000	6	352.782.000	7	423.338.400	8	508.006.080	9	609.607.296	BBPOM

No	SUB PILAR	INDIKASI KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal 2018	Target										PERANGKAT DAERAH
							2019		2020		2021		2022		2023		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengambil Sampel yang Diuji	Pengeneragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Pengawasan Mutu Pangan Segar	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman	3	5	769.000.000	7	800.000.000	9	850.000.000	11	900.000.000	13	950.000.000	BBPOM
pengawasan keamanan pangan olahan;	Pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Program : Pengawasan Obat dan Makanan	Kegiatan Pengawasan Pangan, baik yang terregistrasi MD maupun P-IRT di Provinsi Kalimantan Timur	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	24	42	203.580.000	85	208.670.000	50	213.886.000	90	219.233.000		224.714.000	BBPOM	
				Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	579	590	2.405.829.000	600	2.571.700.000	610	2.653.528.000	620	2.918.880.000	3.210.768.880			
				Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90	71	460.817.000										
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi	100 Pelaku Usaha	150	446.775.000	150	765.500.000	175	1.215.000.000	175	1.639.000.000	200	1.100.000.000	DISPERINDAG	
				Jumlah Barang Beredar Yang Wajib Diawasi (Produk)	10	10		15		10	20		20				
			Program Hilirisasi Produk Peternakan	Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan	Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan yang dilakukan pendampingan	2	2	230.788.000	2	500.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000	DPKH
PILAR IV : PHBS																	
pencegahan dan pengendalian penyakit menular;		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2TB untuk mencapai CDR=>70% dan SR=>90%	0	2	524.905.000	4	600.000.000	5	600.000.000	8	600.000.000	10	600.000.000	Dinas Kesehatan	
				Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2HIV untuk mencapai presentase ODHA yang mendapatkan ARV => 55%	1	2		3		4	6	8					
				Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 Malana untuk mencapai persentase pengobatan Malaria Positif sesuai standart =>95%	5	6		7		8	9	10					
				Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 DBD	1	3		5		7	9	10					
Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah				Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam pencapaian IDL	6	7		8		9	10	10	10	10	Dinas Kesehatan		
				Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam pencapaian persentase respon kewaspadaan kejadian luar biasa	7	8	535.110.000	9	550.000.000	10	550.000.000	10	550.000.000	10		550.000.000	

No	SUB PILAR	INDIKASI KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal	Target										PERANGKAT DAERAH
						2018	2019		2020		2021		2022		2023		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Jumlah Kab/Kota yang melakukan sosialisasi dan membuat rencana kontijensi wabah/bencana	0	1		2		2		2		3		
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;	Diseminasi informasi melalui media cetak dan elektronik (terkait stunting)	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informasi	1) Pelayanan informasi kebijakan daerah	Jumlah balho yang menginformasikan kebijakan daerah	1	6	9 000 000	8	12 000 000	10	15 000 000	12	18 000 000	14	21 000 000	Dinas Komunikasi	
			2) Komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi	Dialog Interaktif di RRI dan TVRI	2	4	35 000 000	6	52 500 000	8	70 000 000	10	87 500 000	12	105 000 000		
			3) Dokumentasi dan publikasi program/kegiatan beranakat daerah	Jumlah Laporan Dokumentasi dan Publikasi Program/ Kegiatan Perangkat Daerah	1	8	37 500 000	10	46 875 000	12	56 250 000	14	65 625 000	16	75 000 000		
	Pencegahan PTM-Terpadu	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah PD provinsi yang dilakukan pembinaan deteksi dini faktor resiko PTM dan implementasi KTR		3	389 925 000	6	500 000 000	9	1 100 000 000	12	1 000 000 000	15	1 091 300 000	Dinas Kesehatan	
				Persentase Kab/Kota yang melaksanakan implementasi KTR minimal di 50% sekolah		30		50	70	90	100						
				Jumlah Kab/Kota yang mempunyai min 50% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu PTM (kasus Hipertensi & DM)		2		3	5	7	10						
			Jumlah Kab/Kota yang min 50% Puskesmasnya melaksanakan deteksi dini kanker payudara pada perempuan usia 30-50 tahun		3		5	7	9	10							
penyediaan air bersih dan sanitasi;	Pengembangan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Program Pembangunan Infrastruktur Keoptakaryaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	Jumlah SPAM (unit)	6	1	15 012 400 000	7	48 724 600 000	4	102 000 000 000	3	100 000 000 000	2	150 000 000 000	Dinas PU PR	
			Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Keoptakaryaan	Jumlah Gedung yang disusun perencanaannya (unit)	7	24		2		5		8		7			
				Jumlah SPAM, IPAL, IPLT dan TPA yang disusun Perencanaannya (unit)	5	1	19 174 350 000	7	7 979 350 000	4	8 000 000 000	3	10 000 000 000	2	10 000 000 000	Dinas PU PR	
				Jumlah pembangunan infrastruktur yang dilakukan pengawasan (Unit)	12	31		5		5		7		7			
PILAR V : KOORDINASI PANGAN DAN GIZI																	
perencanaan pangan dar. gizi;			Program Pembangunan Desa dan Kawasan	Pengembangan dan Mo	Kabupaten Yang Berhasil Dibina	100 000 000	1 Laporan	100 000 000	1 Laporan	700 000 000	1 Laporan	480 000 000	1 Laporan	430 000 000	1 Laporan	425 000 000	DPMPDes
penguatan pencatatan sipil dalam perbaikan gizi;	Akte Kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen administrasi kependudukan	1	1	516 070 000										Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Fasilitasi	Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Jumlah pameran yang diikuti				100	200 000 000	100	250 000 000	100	200 000 000	100	250 000 000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	SUB PILAR	INDIKASI KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal		Target								PERANGKAT DAERAH		
						2018	2019		2020		2021		2022		2023			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
	penguatan pencatatan sipil dalam perbaikan gizi	Akte Kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen administrasi kependudukan	1	1	516.070.000										Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Jumlah pameran yang diikuti				100	200.000.000	100	250.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				Bina Aparatur Pencatatan Sipil	Jumlah perangkat daerah FGD perlindungan anak dalam penanggulangan bencana				100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
pelibatan pemangku kepentingan	Koordinasi Lintas Sektor melalui Pokja Gernas Percepatan Perbaikan Gizi RAD-PG yang disusun Provinsi/Kab/Kota	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah kegiatan penguatan OPD/Lintas Sektor yang mengimplementasikan kebijakan publik berwawasan kesehatan (kali)		3			6		9		12		15	Dinas Kesehatan		
				Jumlah penyebaran informasi kesehatan melalui berbagai saluran komunikasi pertahun (kali)		5	924.100.000	5	903.340.000	5	903.340.000	5	903.340.000	5	903.340.000			
				Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan penilaian (posyandu dan PHBS) dalam setahun		10		10		10		10		10				
				Jumlah Rumah Sakit di Kalimantan Timur yang dilakukan pembinaan PKRS		9		9		9		9		9				
		Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial (Laporan)		1	1	710.000.000	1	910.000.000	1	910.000.000	1	910.000.000	1	910.000.000	Bappeda	
				Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)		1	0		1		1		1		1			
pemantauan dan evaluasi dan	Pemantauan, Evaluasi, dan Perumusan Kebijakan terkait ketersediaan dan kerawanan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Tersedia Cadangan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi	140 ton	250 ton	1.300.000.000	350 ton	1.300.000.000	400 ton	1.400.000.000	425 ton	1.500.000.000	450 ton	1.600.000.000	Dinas Pangan TPH		
			Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Data ketersediaan dan kerawanan pangan (Laporan)	4	4	440.000.000	4	850.000.000	4	850.000.000	4	900.000.000	4	850.000.000	Dinas Pangan TPH		
penyusunan dan penyampaian laporan			Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan	1	1	897.000.000	4	1.147.000.000	4	1.147.000.000	4	1.147.000.000	Bappeda dan seluruh PD			

Salam sejahtera dan sukses
 SEKRETARAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
 KEPALA BUREAU HUKUM

 H. SURYO SUPRI
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19620521085031000

Samarinda, 23 September 2019
 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
 ttd
 ISRAN NOOR